PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN /TERNAK UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin pengawasan penyakit Hewan/Ternak Unggas dan pengendalian populasi produksi perlu dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas serta hasil ikutannya sekaligus meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (P.A.D) Kota Binjai dari Sektor Retribusi.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas perlu menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertenakan dan kesehatan Hewan
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Utara.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit Hewan.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan masyarakat Veteriner.
 - 8. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
 - 9. Instruksi bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 1989 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi, Kerbau, Betina Bunting dan sapi/Kerbau Betina Bibit.
 - 10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 418/KPTS/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Pengobatan Penyakit hewan Menular.
 - 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 418/KPTS/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta hasil ikutannya.
 - 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor P830/KPTS/OT/219/12/1994 tentang Penyarahan sebagian Usaha Urusan Pemerintah dibidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II.
 - 13. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 tahun 1957 tentang

Pelaksanaan Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah Propinsi dalam Lapangan Kehewanan kepada Pemerintah Kabupaten Kotamadya dalam Daerah Sumatera Utara.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetatapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN /TERNAK UNGGAS DAN HASIL IKUTANNYA DI KOTA BINJAI

BAB I KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota binjai
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah kota Binjai
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
- e. Dinas adalah Dinas Pertenakan Kota Binjai
- f. Juru periksa adalah Dokter Hewan Pemerintah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
- g. Hewan Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba.
- h. Unggas adalah setiap jenis Burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk Ayam, itik, Burung, puyuh dan belibis.
- i. Hasil Ikutan adalah Hasil produk dari Pemotongan Hewan Ternak dan Unggas berupa Daging, Susu, Kulit, Tulang Bulu Unggas dan telur.
- j. Pemeriksaan adalah Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Hewan Ternak, Unggas, baik yang akan dipotong maupun yang akan diperjual belikan dan hasil ikutannya.
- k. Tempat pemeriksaan adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan Pemeriksaan.
- Tempat penampungan hewan, Ternak dan Unggas adalah tempat untuk menampung Hewan / Ternak dan Unggas yang berasal dari luar daerah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Swasta.
- m. Surat Izin adalah Izin pemeliharaan ternak, produksi ternak dan hasil ikutannya dari Kota Binjai yang disediakan oleh pemerintah.
- n. Peredaran Ternak Unggas, Produksi Ternak Unggas dan hasil ikutannya adalah setiap kegiatan Pengeluaran dan atau Pemasukan Ternak Unggas, Produksi Ternak Unggas
- o. Kesehatan Masyarakat Verteriner ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan tarnak uinggas dan bahan yang berhubungan dengan ternak unggas yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.